

**RANCANGAN MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PEDESAAN
BERBASIS AGRIBISNIS DI DAERAH RIAU
*MODELING OF ECONOMIC EMPOWERMENT OF RURAL COMMUNITY
BASED ON AGRO-BUSINESS ACTIVITIES IN RIAU***

Oleh :Almasdi Syahza

Pusat Pengkajian Koperasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PPKPEM)
Universitas Riau

(Diterima : 10 Juli 2003, disetujui : 5 Agustus 2003)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor pendukung pembangunan ekonomi pedesaan. Pelaksanaan pembangunan pertanian di pedesaan harus dirancang dengan sistem agribisnis yang melibatkan berbagai lembaga ekonomi dan penunjang, antara lain: perguruan tinggi, lembaga perkreditan, pengusaha, pengusaha tani (petani), dan koperasi. Koperasi merupakan motor penggerak pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Koperasi berfungsi sebagai badan usaha di pedesaan dan pelaksana penuh sistem agribisnis. Koperasi agribisnis dapat menciptakan peluang usaha dalam kegiatan ekonomi pedesaan sehingga menyebabkan naiknya pendapatan masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan.

Kata kunci : Pemberdayaan, ekonomi pedesaan, agribisnis

ABSTRACT

The objective of study was to identify the supporting factors of rural economic development. Studies showed that agricultural development in rural areas should be designed using agro-business system that involved several economic institutions and their supports, such as: universities, micro-financing, entrepreneurs, farmer, public cooperatives. Public cooperative is a driving motor of the empowerment of rural community economy. The cooperative serves as a business unit that carry out agro-business activities. The cooperative would create employment, generate society income and increase social welfare, especially for the rural society.

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor pertanian di daerah Riau sampai saat ini cukup meng-gembirakan. Namun, tingkat pendapatan masyarakat dari usaha pertanian belum meningkat seperti yang diharapkan. Karena itu, Pemerintah Daerah Riau mencanang-kan sasaran pembangunan Daerah Riau

harus mengacu kepada Lima Pilar Utama, yaitu 1) pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan; 2) pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia; 3) pembangunan kesehatan/olahraga; 4) pembangunan/kegiatan seni budaya; dan 5) pembangunan dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa. Pembangunan ekonomi

pedesaan, nelayan, perajin; dan pengusaha industri kecil (Pemda Riau dalam Syahza, 2001a).

Setiap pembangunan di daerah tidak terlepas dari kelima pilar utama pembangunan daerah Riau. Karena pembangunan daerah sangat ditentukan oleh potensi yang dimiliki oleh suatu daerah, maka kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah harus mengacu kepada potensi daerah yang berpeluang untuk dikembangkan, khususnya sektor pertanian. Potensi tersebut antara lain 1) pengembangan tanaman hortikultura; 2) tanaman perkebunan; 3) usaha perikanan; 4) usaha peternakan; 5) usaha pertambangan; 6) sektor industri; dan 7) potensi kepariwisataan (Syahza, 2003b).

Pengembangan sektor pertanian dalam arti luas harus diarahkan kepada sistem agribisnis dan agroindustri, karena pendekatan ini akan dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian dan pada hakekatnya dapat meningkatkan pendapatan bagi para pelaku agribisnis dan agroindustri di daerah (Arifin, 2001).

Faktor lain yang mendukung prospek pengembangan agribisnis di Daerah Riau untuk masa datang, antara lain adalah 1) penduduk yang makin bertambah sehingga kebutuhan pangan juga bertambah; ini merupakan peluang pasar yang baik bagi pelaku agribisnis; 2) meningkatnya pendapatan masyarakat akan meningkatkan kebutuhan pangan berkualitas dan

beragam (diversifikasi). Keragaman produk menuntut adanya pengolahan hasil (agroindustri); dan 3) perkembangan agribisnis juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah, meningkatkan pendapatan petani yang pada akhirnya diharapkan akan mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat (Syahza, 2002a).

Menurut Saragih (2001a), sektor agribisnis sebagai sektor ekonomi rakyat masih memiliki prospek yang cerah untuk dikembangkan lebih lanjut, baik untuk memperkuat ekonomi rakyat, maupun sebagai andalan Indonesia dalam perdagangan bebas dunia.

Untuk mewujudkan tujuan pengembangan ekonomi kerakyatan, terutama di sektor pertanian, perlu dipersiapkan kebijakan strategis untuk memperbesar atau mempercepat pertumbuhan sektor pertanian, khususnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah pengembangan agribisnis dan agroindustri yang terencana dengan baik dan terkait dengan pembangunan sektor ekonomi lainnya.

Dalam upaya penguatan ekonomi rakyat, industrialisasi pertanian merupakan syarat keharusan (*necessary condition*), yang menjamin iklim makro yang kondusif bagi pengembangan ekonomi rakyat yang sebagian besar berada pada kegiatan ekonomi berbasis pertanian. Untuk

rantai ekonomi dalam industrialisasi pertanian (Saragih, 2001b). Organisasi bisnis di pedesaan ini berfungsi sebagai lembaga pemasaran produk pertanian.

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengidentifikasi faktor pendukung pembangunan ekonomi pedesaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan model pemberdayaan ekonomi pedesaan yang berbasis agribisnis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode survei. Lokasi penelitian di Kabupaten Pelalawan (10 kecamatan) dan Kabupaten Karimun (3 kecamatan). Pada setiap kecamatan dipilih daerah yang berpotensi bagi pengembang-an komoditi agribisnis dengan kriteria 1) daerah yang terpilih sebagai sampel merupakan daerah yang berpotensi menghasilkan komoditas unggulan pada setiap kecamatan; 2) petani sampel adalah petani di daerah yang hidupnya bergantung pada hasil pertanian. Waktu penelitian selama 5 (lima) bulan yaitu bulan Juni sampai Oktober 2001.

Penelitian ini banyak menggunakan data primer, antara lain 1) data dari aparat pedesaan dan pemuka masyarakat mengenai potensi sumberdaya yang ada, bentuk perekonomian masyarakat, komoditas unggulan dan penunjang di pedesaan, kebiasaan masyarakat

dalam berusahatani, diversifikasi usahatani, dan pemilikan faktor produksi oleh masyarakat; 2) data dari masyarakat mengenai kegiatan usahatani, pola usahatani dan penggunaan faktor produksi pertanian, produksi, harga jual, rantai pemasaran, status pemilikan dan penguasaan lahan, kontribusi pendapatan, dan tingkat kemampuan petani serta persoalan yang dihadapi oleh petani; dan 3) lembaga tataniaga yang berhubungan secara langsung dengan ekonomi masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode Rapid Rural Appraisal (RRA), yaitu pendekatan partisipatif untuk mendapatkan data/informasi dan penilaian (assesment) secara umum di lapangan dalam waktu yang relatif pendek. Kelebihan pendekatan ini adalah penelitian bisa mencakup daerah yang lebih luas dalam waktu relatif singkat untuk mendapatkan informasi yang luas secara umum. Dalam metode RRA ini informasi yang dikumpulkan terbatas pada informasi dan yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian, tetapi dilakukan dengan lebih mendalam dengan menelusuri sumber informasi sehingga didapatkan informasi yang lengkap tentang sesuatu hal.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu data dan informasi yang diperoleh dianalisis secara deskriptif terutama terhadap data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesenjangan Ekonomi Masyarakat

Pertumbuhan ekonomi yang kita pacu selama ini belum mencerminkan distribusi pendapatan yang adil dan merata, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat, seperti masyarakat perkotaan, sedangkan masyarakat pedesaan atau pinggiran mendapat porsi yang kecil dan tertinggal. Masih terjadi kesenjangan (disparitas) terutama antar daerah dan sektor serta antar golongan masyarakat. Kesenjangan antar daerah ini paling menyolok adalah antara daerah pengembangan kawasan industri dengan kawasan pengembangan pertanian. Daerah pengembangan pertanian tersebut mata pencarian pokok masyarakatnya hanya bergantung kepada pemanfaatan sumberdaya alam yang tersedia yaitu, perkebunan, mencari kayu, nelayan, dan petani tradisional (subsisten).

Kesenjangan ini akan diperburuk karena adanya kesenjangan dalam pembangunan antar sektor, terutama antara sektor pertanian (basis ekonomi pedesaan) dan nonpertanian (basis ekonomi perkotaan). Kesenjangan ini akan berakibat pada tingkat kesejahteraan berbagai kelompok masyarakat. Jika masalah ini tidak ditangani secara serius, maka kesenjangan antara kota dan pedesaan akan semakin parah, sehingga daerah-daerah tertinggal akan semakin banyak ditemui. Kesenjangan ini cukup berbahaya

karena menyimpan potensi konflik kerusuhan dan kecemburuan sosial (Syahza, 2002b).

Adanya daerah-daerah tertinggal ini tidak hanya membawa kemiskinan bagi masyarakat, tetapi dalam jangka panjang akan menyebabkan daerah tertinggal akan semakin tertinggal sementara yang maju akan tetap semakin maju dengan percepatan yang semakin tinggi dan sulit dikejar. Penyebabnya adalah perbedaan sumberdaya manusia (SDM), pertumbuhan awal dan hasil pembangunan yang secara akumulatif mendorong pertumbuhan selanjutnya, sehingga akselerasi pembangunan di kedua daerah akan tetap berbeda. Kesenjangan ini hanya dapat diatasi melalui campur tangan pemerintah dengan cara mengkatrol daerah tertinggal sehingga basis perekonomian menjadi terangkat untuk memacu pertumbuhan dan bersaing dengan daerah lain.

Secara teori, meningkatnya kesenjangan antar-daerah atau antar-masyarakat disebabkan oleh banyak faktor, antara lain : kurangnya pendidikan dan keterampilan, tidak dimilikinya faktor produksi seperti tanah dan modal, tidak adanya akses terhadap permodalan dan pemasaran hasil pertanian. Kekurangan tersebut akan menyebabkan rendahnya kemampuan berproduksi, sehingga akan berakibat rendahnya pendapatan keluarga (Syahza, 2003c).

Untuk mengatasi kesenjangan

modal, meningkatkan pendidikan dan keterampilan, memberikan bimbingan dan pelatihan. Di dalam sektor pertanian, dikenal bermacam-macam jenis kredit untuk membantu permodalan usaha petanian, perikanan, dan perkebunan. Namun, usaha yang dilakukan tersebut belum mampu mengangkat kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat pedesaan. Untuk itu perlu adanya terobosan melalui pemberdayaan ekonomi rakyat. Terobosan ini harus disesuaikan dengan potensi masyarakat dan ketersediaan sumberdaya yang ada, misalnya bantuan modal dan pendampingan untuk membantu pemasaran dan manajemen produksi. Bagi berhasilnya program ini, penting bahwa program bimbingan dan pelatihan ini dilakukan secara berkesinambungan untuk beberapa periode dan dievaluasi terus menerus.

Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Krisis ekonomi yang melanda saat ini telah menyebabkan pemerintah dan para pengambil kebijaksanaan kembali berpikir ulang tentang arah perekonomian yang selama ini ditempuh. Kini timbul kemauan politik yang kuat untuk membenahi inefisiensi dan mis-alokasi sumberdaya (misallocation of resources) yang terjadi di sektor riil yang selama ini dibiarkan saja terjadi karena kuatnya vested interest para pemburu rente yang menguasai pemerintahan. Akibat dari misalokasi sumberdaya adalah

terbaikannya pembangunan pertanian dan industri yang berbasis sumberdaya alam serta sumberdaya pertanian (resource based industries). Banyak industri yang dibangun yang membutuhkan bahan baku dan komponen yang harus diimpor atau industri yang tidak banyak terkait dengan perekonomian lokal sehingga industri ini sangat rentan terhadap gejolak mata nilai uang. Industri jenis ini pada umumnya adalah industri yang berpihak kepada golongan ekonomi kuat (Syahza, 2003a).

Dalam mengatasi krisis ekonomi sekarang kebijakan ekonomi harus menganut paradigma baru dengan pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi perhatian utama. Karena sebagian besar rakyat hidup pada sektor pertanian dan sektor ini masih memberikan kontribusi yang besar pada perekonomian negara, maka pemberdayaan ekonomi rakyat juga berarti membangun ekonomi pertanian lebih baik. Pembangunan industri harus memperhatikan keterkaitan ke belakang (backward linkage) dengan sektor pertanian atau sektor primer sedangkan keterkaitan ke depan (forward linkage) harus memperhatikan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dan pemasaran yang baik sehingga produk yang dihasilkan tidak sia-sia. Konsep pengembangan pertanian ini disebut dengan konsep agribisnis.

Untuk mewujudkan tujuan pengembangan ekonomi kerakyatan,

mengembangkan agribisnis yang terencana dengan baik dan terkait dengan pembangunan sektor ekonomi lainnya. Gambaran keadaan penduduk dan mata pencaharian utama yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan di dua kabupaten adalah sebagai berikut :

Kabupaten Karimun

Pengembangan agribisnis untuk daerah Kabupaten Karimun juga ditunjang dengan banyaknya keluarga tani di daerah ini. Dari data yang diperoleh, jumlah ke-luarga tani yang hidupnya tergantung pada sektor pertanian sebanyak 14.336 KK atau sebesar 35,40 persen (Tabel 2). Keluarga tani yang terbanyak penyebarannya di Kecamatan Kundur yaitu sebanyak 8.932 KK atau 65,31 persen dari jumlah KK yang ada di Kecamatan Kundur. Angka ini menunjukkan bahwa di Kecamatan Kundur mata pecaharian pokok masyarakat adalah sektor pertanian, baik sebagai petani yang terlibat langsung dalam kegiatan pertanian maupun sebagai tenaga kerja di sektor per-tanian. Kegiatan pertanian yang diusahakan oleh keluarga tani tersebut adalah dalam

bidang hortikultura, perkebunan, peternak-an, dan perikanan (Syahza, 2001b).

Pemberdayaan ekonomi pedesaan yang berbasis agribisnis di daerah Kabupaten Karimun akan dapat meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan keluarga petani. Hal ini didukung oleh kondisi wilayah yang cocok untuk pengembangan pertanian, begitu juga daerah pemasarannya sangat strategis karena berhadapan langsung dengan pusat pertumbuhan ekonomi Batam.

Kabupaten Pelalawan

Sumber penghasilan penduduk Kabupaten Pelalawan pada umumnya adalah pertanian, yaitu dari sektor perkebunan, tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura. Kegiatan lain berupa usaha sambilan, yaitu mencari kayu ke hutan. Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa hampir 80 persen penduduk adalah rumah tangga petani di Kabupaten Pelalawan. Pertanian merupakan mata pencarian pokok masyarakat karena daerah ini memang sesuai untuk kegiatan pertanian terutama perkebunan kelapa sawit. Sektor perkebunan

Tabel 1. Jumlah Penduduk dan Keluarga Tani di Kabupaten Karimun

Kecamatan	Penduduk	Kepala Keluarga		Jumlah KK
		KK Petani	KK Nonpetani	
1. Karimun	98.780	4.924 (22,93)	16.549 (77,07)	21.473
2. Kundur	63.218	8.932 (65,31)	4.745 (34,69)	13.677
3. Moro	24.576	480 (8,99)	4.862 (91,01)	5.342
Jumlah	186.574	14.336 (35,40)	26.156 (64,60)	40.492

Sumber : Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Karimun Tahun 2001.

Angka dalam kurung menunjukkan persentase terhadap jumlah KK di Kecamatan.

sebagian masyarakat yang tidak terlibat dalam kegiatan perkebunan kehidupannya sangat memperhatikan, karena keterbatasan sumberdaya yang mereka miliki, antara lain modal, tingkat pendidikan, dan keterbatasan pengetahuan mereka terhadap pemasaran produk pertanian. Di sisi lain, masih banyak daerah yang terisolasi dan sarana transportasi yang terbatas. Hal ini menyebabkan sulitnya masyarakat petani untuk memasarkan produk mereka ke luar daerah (Syahza, 2001c).

Guna mengatasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan tersebut, perlu ditemukan alternatif pemecahan persoalan yang dihadapi oleh petani pedesaan. Cara ini akan dapat membuka daerah pemasaran produk

pertanian, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan.

Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Berbasis Agribisnis

Sistem agribisnis adalah semua aktivitas mulai dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi sampai kepada pemasaran produk yang dihasilkan usahatani dan agroindustri yang saling terkait satu sama lain. Agribisnis sebagai suatu sistem meliputi 1) subsistem pengadaan sarana produksi; 2) subsistem produksi; 3) subsistem pengolahan hasil; 4) subsistem pemasaran; dan 5) subsistem kelembagaan. Agar semua subsistem itu dapat berjalan sesuai dengan tuntutan agribisnis, perlu dirancang model pemberdayaan

Tabel 2. Jumlah Rumah Tangga dan Rumah-tangga Petani Menurut Kecamatan di Kabupaten Palalawan Tahun 2000

Kecamatan/ Desa/Kelurahan	Penduduk		Jumlah Rumah Tangga Petani	
	Jiwa	Rmh. Tangga	Rmh. Tangga	Persentase*
1. Langgam	12.978	2.009 (4,27)	1.266	63.02
2. Pangkalan Kerinci	36.679	3.728 (4,14)	902	24.20
3. U K U I	34.087	4.435 (3,96)	3.737	84.26
4. Pangkalan Lesung	14.789	3.162 (4,15)	2.918	92.28
5. Pangkalan Kuras	25.180	5.164 (3,98)	4.139	80.15
6. Bunut	16.284	3.256 (3,56)	2.710	83.23
7. Pelalawan	11.030	1.846 (3,83)	1.723	93.34
8. Kerumutan	15.463	2.940 (4,59)	2.932	99.73
9. Teluk Meranti	20.629	1.588 (5,21)	1.507	94.90
10. Kuala Kampar	26.262	4.447 (4,82)	4.133	92.94
JUMLAH	213.381	32.575 (4,21)	25.967	79.71

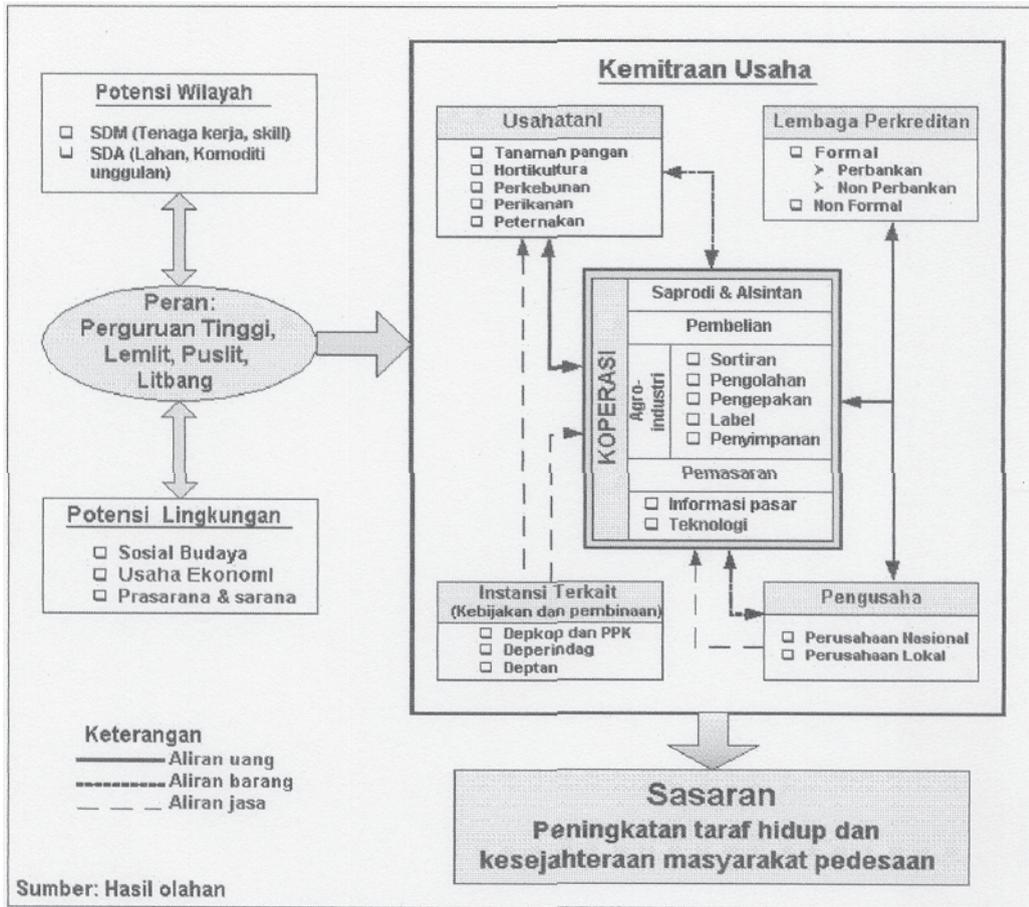
Sumber : Palalawan Dalam Angka Tahun 2001.

* Menyetakan persentase terhadap rumah tangga kecamatan.

Angka dalam kurung merupakan rata-rata anggota keluarga.

Pengamatan di lapangan menemukan beberapa faktor pendukung pembangunan ekonomi pedesaan yang berbasis agribisnis, antara lain 1) peran perguruan tinggi; 2) pengusaha; 3) lembaga perkreditan; 4) pengusaha tani (petani); 5) instansi terkait; dan 6) koperasi sebagai badan usaha. Rangkaian kerja dari faktor pendukung ekonomi pedesaan tersebut disajikan pada Gambar 1.

sumberdaya manusia (SDM), sumberdaya alam (SDA) termasuk kesesuaian lahan, ketersediaan lahan serta komoditas unggulan daerah. Dimensi kedua mengetahui potensi lingkungan masyarakat pedesaan dan peluang usaha yang cocok dengan sosial budayanya termasuk ketersediaan prasarana dan sarana. Dimensi ketiga



Peran perguruan tinggi

Gambar 1 Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Berbasis Agribisnis melalui lembaga penelitian, atau pusat penelitian sangat memegang peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Peran PT ini memiliki tiga dimensi kekuatan. Dimensi pertama PT menggali potensi wilayah

kedua kepada kelompok mitra usaha agribisnis. Di samping itu sebagai lembaga independen, PT merupakan lembaga pemantau kegiatan agribisnis di pedesaan.

Pada kelompok mitra usaha agribisnis terlibat lima kelompok pelaku agribisnis, yaitu lembaga ekonomi pedesaan (koperasi), pengusaha tani (petani), lembaga perkreditan, pengusaha, dan instansi pemerintah. Kelima kelompok mitra usaha ini harus merupakan satu kesatuan yang saling berkait dalam kegiatan agribisnis.

Pengusaha

Pengusaha yang dimaksud di sini adalah pengusaha sebagai pemilik modal dan sebagai pedagang (perantara, penyalur, pengecer). Sebagai pemilik modal, pengusaha menjalin kerjasama dengan koperasi dalam penyediaan sarana produksi, alat/mesin pertanian, termasuk penyediaan teknologi yang mendukung kegiatan agribisnis di pedesaan. Fungsinya sebagai pedagang adalah menyalurkan produk pertanian yang telah melalui proses pengolahan oleh koperasi sesuai dengan standar yang ditentukan oleh pedagang. Target pasar disesuaikan dengan kriteria produk yang ada, bisa saja ekspor, swalayan, restoran, hotel, atau pasar tradisional. Dari sisi lain, pengusaha juga memberikan informasi pasar melalui koperasi, apakah menyangkut daya beli pasar, peluang pasar, dan lain sebagainya. Pengusaha juga dapat menyediakan tenaga ahli yang ditempatkan di koperasi. Tenaga ahli ini disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, apakah tenaga ahli bidang produksi, pemasaran, atau pengendali mutu.

Lembaga Perkreditan

Lembaga perkreditan pada kegiatan agribisnis cukup memegang peranan. Lembaga ini berfungsi sebagai penyedia kredit bagi koperasi dan pengusaha. Pada model pemberdayaan ekonomi yang berbasiskan agribisnis ini, lembaga perkreditan hanya berhubungan langsung dengan koperasi dan pengusaha. Kredit disalurkan melalui koperasi di pedesaan yang sudah mempunyai bentuk usaha agribisnis dan agroindustri. Koperasi mengajukan kredit untuk modal kerja bagi anggota (petani) dan modal kerja bagi koperasi itu sendiri (sebagai pelaku agroindustri). Kredit kepada pengusaha bisa saja dalam bentuk pengembangan usaha (swalayan, toko, ekspor, penyediaan teknologi, dan lain sebagainya).

Pengusaha Tani (Petani)

Kurang berkembangnya kegiatan pertanian yang berbasiskan agribisnis di pedesaan disebabkan karena beberapa hal, antara lain tingkat pengetahuan petani, kepemilikan modal yang kecil, tidak adanya kepastian pasar, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung. Usaha untuk mengatasi semuanya ini harus dilakukan melalui organisasi yang mempunyai misi sama. Koperasi di pedesaan merupakan pilihan yang paling tepat. Koperasi merupakan salah satu jaminan pasar produk pertanian di pedesaan. Oleh karena itu, petani harus mengutamakan produksi komoditas unggulan di daerahnya. Petani melakukan usahanya

dan petani. Bentuk kemitraan usaha ini akan memberikan beberapa keuntungan kepada petani, antara lain 1) adanya jaminan pasar produk pertanian bagi petani; 2) terhindarnya petani dari risiko fluktuasi harga; 3) didapatnya tiga keuntungan oleh petani, yaitu keuntungan dari hasil penjualan produk pertanian, keuntungan dari pembagian sisa hasil usaha oleh koperasi pada akhir tahun, dan keuntungan dari investasi yang ditanamkan pada koperasi (paket agroestat); dan 4) terjalinnya hubungan kemitraan usaha antara koperasi dan petani.

Instansi Terkait

Keterlibatan pihak pemerintah dalam model pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan yang berbasis agribisnis diharapkan hanya sebatas pembuat kebijakan dan pembinaan. Kebijakan menyangkut dengan ketentuan dan peraturan yang saling menguntungkan pelaku agribisnis. Sedangkan pembinaan diberikan kepada koperasi dan petani. Instansi terkait dapat saja melakukan pembinaan kepada kedua kelompok ini dengan memakai tenaga profesional dari luar, baik dari perguruan tinggi maupun dari lembaga profesi lainnya.

Koperasi sebagai Badan Usaha

Untuk mengembangkan usaha agribisnis skala kecil perlu dibentuk koperasi. Tanpa koperasi tidak mungkin agribisnis kecil dapat berkembang. Koperasi inilah nantinya akan berhubungan dengan pengusaha besar (Saragih, 2001 b).

Koperasi memegang peranan sangat penting pada kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Koperasi harus berfungsi sebagai badan usaha di pedesaan dan pelaksana penuh subsistem agribisnis. Koperasi sebagai perantara penyalur sarana produksi dan alat/mesin pertanian kepada anggota (petani). Dari sisi lain, koperasi juga bertindak sebagai pedagang perantara dari produk pertanian yang dihasilkan oleh anggotanya. Koperasi juga berfungsi sebagai lembaga pemasaran dari produk pertanian. Pada koperasi dilakukan pengolahan hasil (sortiran, pengepakan, pemberian label, dan penyimpanan) sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pasar. Koperasi juga berperan sebagai media informasi pasar, apakah peluang pasar, perkembangan harga, dan daya beli pasar. Melalui informasi pasar koperasi harus dapat menciptakan peluang pasar bagi berbagai produk pertanian, sehingga petani tidak ragu untuk melakukan kegiatan usahatani mereka karena ada jaminan dari koperasi bahwa produk mereka akan ditampung. Kegiatan ini akan merangsang partisipasi anggota terhadap koperasi, yang pada hakekatnya terjadi kesinambungan usaha koperasi.

Investasi yang dilakukan oleh koperasi berupa transportasi, mesin pengolah produk pertanian (agroindustri), mesin dan alat pertanian harus berupa penanaman modal atas nama anggota. Artinya setiap anggota mempunyai saham

Koperasi juga berperan sebagai penyedia kredit yang diperoleh dari lembaga perkreditan dan pengusaha. Pemberian kredit ini didasarkan kepada bentuk usaha pertanian yang mengembangkan komoditas unggulan dan punya peluang pasar. Tingkat pengembalian kredit oleh petani dapat dilakukan melalui pemotongan penjualan hasil pertanian kepada koperasi.

Koperasi, sebagai unit usaha di bidang agribisnis, secara umum mencakup bidang usaha yang sangat luas yang pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi lima komponen utama, yaitu 1) bidang usaha yang menyediakan dan menyalurkan sarana produksi berupa alat dan mesin pertanian; 2) bidang usaha dalam produksi komoditas pertanian; 3) bidang usaha industri pengolahan hasil pertanian (agro-industri); 4) bidang usaha pemasaran hasil pertanian; dan 5) bidang usaha pelayanan seperti perbankan, angkutan, asuransi, atau penyimpanan (Syahza, 2003b).

Kegiatan unit usaha ini akan menimbulkan efek pengganda (multiplier effect) dalam kehidupan masyarakat. Pada hakikatnya, agribisnis sebagai unit usaha dapat menciptakan peluang usaha dalam kegiatan ekonomi sehingga menyebabkan naiknya pendapatan masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

KESIMPULAN

1. Pengembangan agribisnis yang terencana dengan baik dan terkait dengan pembangunan sektor ekonomi lainnya merupakan kebijakan yang strategis untuk memperbesar atau mempercepat pertumbuhan sektor pertanian, khususnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Untuk itu diperlukan faktor pendukung pembangunan ekonomi pedesaan terutama yang berbasis agribisnis, antara lain 1) peran perguruan tinggi; 2) pengusaha; 3) lembaga perkreditan; 4) pengusaha tani (petani); 5) instansi terkait; dan 6) koperasi sebagai badan usaha.
2. Perguruan tinggi memegang peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan, peran tersebut antara lain 1) dapat menggali potensi wilayah sumberdaya manusia (SDM), sumberdaya alam (SDA) termasuk kesesuaian lahan, ketersediaan lahan serta komoditas unggulan daerah; 2) mengetahui potensi lingkungan masyarakat pedesaan dan peluang usaha yang cocok dengan sosial budayanya termasuk ketersediaan prasarana dan sarana; 3) memberikan rekomendasi dari hasil perpaduan peran pertama dan kedua kepada kelompok mitra usaha agribisnis.
3. Koperasi merupakan motor

REKOMENDASI

1. Agar semua subsistem agribisnis itu dapat berjalan sesuai dengan tuntutan agribisnis, perlu dirancang model pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan berdasarkan agribisnis dengan melibatkan beberapa lembaga pendukung dalam bentuk kelompok mitra usaha agribisnis, yaitu: lembaga ekonomi pedesaan (koperasi), pengusaha tani (petani), lembaga perkreditan, pengusaha, dan instansi pemerintah.
2. Investasi yang dilakukan oleh koperasi pada kegiatan agribisnis harus berupa penanaman modal atas nama anggota. Karena itu setiap anggota harus mempunyai saham kepemilikan aset koperasi agribisnis. Dengan demikian, konsep agroestat di pedesaan dapat berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, B. 2001. *Spektrum Kebijakan Pertanian Indonesia*. Erlangga, Jakarta.
- Saragih, B. 2001a. *Suara Dari Bogor: Membangun Sistem Agribisnis*. Yayasan USESE, Bogor.
- . 2001b. *Agribisnis: Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian*. Yayasan USESE, Bogor.
- Syahza, A. 2001a. *Studi Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat di Propinsi Riau*. PPKPEM Unri, Pekanbaru.
- . 2001b. *Penelitian dan Pengembangan Agribisnis di Kabupaten Karimun*. BAPPEDA Kabupaten Karimun, Pekanbaru.
- . 2001c. *Studi Sosial Ekonomi Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Pelalawan*. BAPPEDA Kabupaten Pelalawan, Pekanbaru.
- . 2002a. *Potensi Pembangunan Industri Hilir Kelapa Sawit di Daerah Riau*. dalam *Usahawan Indonesia*, No. 04/TH XXXI April 2002, Lembaga Manajemen FE UI, Jakarta.
- . 2002b. *Potensi Pengembangan Desa Tertinggal dan Mobilitas Penduduk di Kabupaten Bengkalis Riau*. *Kependudukan* 4 (2) : 8-14.
- . 2003a. *Potensi Pembangunan Industri Minyak Goreng di Riau*. *Sosiohumaniora* 5 (1) : 12-17.
- . 2003b. *Padigma Baru: Pemasaran Produk Pertanian Berbasis Agribisnis di daerah Riau*. dalam *Jurnal Ekonomi*, TH. V111/01/2003, PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.
- . 2003c. *Analisis Usahatani Hortikultura Sebagai Komoditi Unggulan Agribisnis di Daerah Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau*. dalam *Perspektif*, Volume 8 Nomor 1, Juni 2003, Fakultas